

SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN DAN ABDIMAS TAHUN 2017



Sertifikat

Nomor: 106/STKIP PGRI/LPPM/X/2017

Diberikan kepada:

Dr. Mukodi, M.S.I.

Sebagai

Narasumber

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Abdimas Tahun 2017 dengan judul "Korupsi dan Kebangkrutan Sebuah Bangsa" yang diselenggarakan LPPM STKIP PGRI Pacitan pada tanggal 14 Oktober 2017.

Mengetahui,

Ketua STKIP PGRI Pacitan


DR. SUGENG SURYANTO, M.Pd.
NIDN. 0710025602



co-host:

STKIP PGRI Tulungagung

Pacitan, 14 Oktober 2017

Kepala LPPM STKIP PGRI Pacitan


SUGIYONO, M.Pd.
NIDN. 0731128501

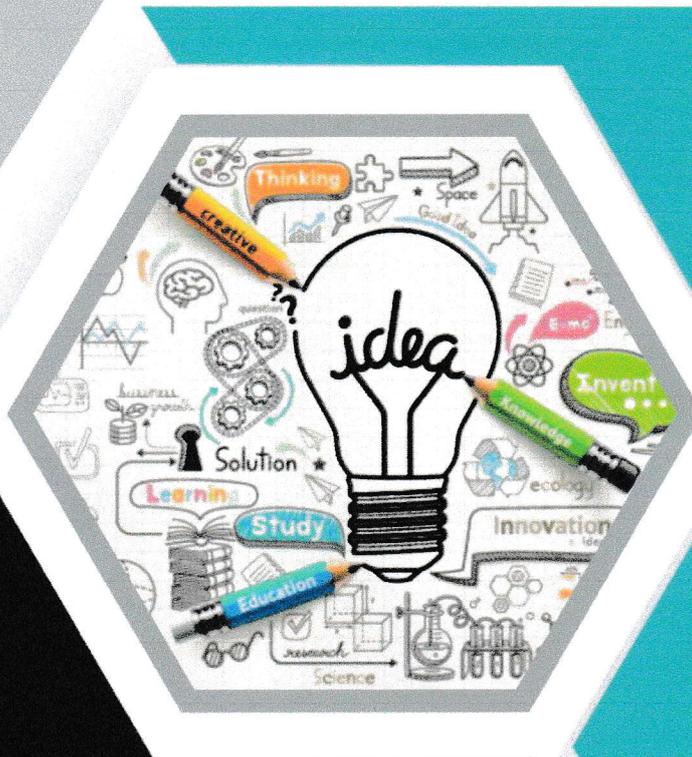


SEMNAS
STKIP PGRI PACITAN

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

HASIL PENELITIAN DAN ABDIMAS



**Pacitan,
14 Oktober
2017**

“Manifestasi Saintifik untuk Meningkatkan
Daya Saing Bangsa pada Era Konseptual”

**STKIP PGRI PACITAN
TAHUN 2017**

STKIP PGRI Pacitan

No _____ / STKIP _____

MENGESAHKAN

Salinan Foto copy sesuai dengan aslinya

Pacitan Tgl. _____ 20 _____

Retua



SRIRIYANTI, M.Pd.
NIDN. 0722066401

ISBN:978-602-50110-3-0



PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN DAN ABDIMAS

**"Manifestasi Saintifik untuk Meningkatkan Daya Saing
Bangsa pada Era Konseptual"**

Pacitan, 14 Oktober 2017

**Diterbitkan Oleh
LPPM PRESS STKIP PGRI Pacitan**



PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN DAN ABDIMAS

*Artikel-artikel dalam prosiding ini telah dipresentasikan
pada Seminar Nasional Pendidikan
pada tanggal 14 Oktober 2017
di STKIP PGRI Pacitan*

Tim Penyunting Artikel Seminar:

- 1. Dr. Mukodi, M.S.I.**
- 2. Sugiyono, M.Pd.**
- 3. Mulyadi, M.Pd.**
- 4. Bakti Sutopo, M.A.**
- 5. Urip Tisngati, M.Pd.**
- 6. Tika Dedy Prasetyo, M.Kom.**
- 7. Arif Mustofa, M.Pd.**
- 8. Hasan Khalawi, M.Pd.**
- 9. Hari Purnomo Susanto, M.Pd.**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
STKIP PGRI Pacitan
2017**

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN DAN ABDIMAS

“Manifestasi Saintifik untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa pada Era Konseptual”

**Diselenggarakan oleh:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
STKIP PGRI Pacitan**

**Diterbitkan oleh:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Press STKIP PGRI Pacitan
(LPPM Press STKIP PGRI Pacitan)
Jalan Cut Nyak Dien No 4A Ploso Pacitan**

**Cetakan ke – 1
Terbitan Tahun 2017
Katalog dalam Terbitan (KDT)
Seminar Nasional (2017Desember 29: Pacitan)
Penyunting: Mukodi [et.al] – Pacitan: LPPM
STKIP PGRI Pacitan, 2017**

ISBN: 978-602-50110-3-0

**Penyuntingan semua tulisan dalam prosiding ini dilakukan
oleh Tim Penyunting Seminar Nasional Pendidikan Tahun 2017 dari LPPM STKIP PGRI
Pacitan**

**Prosiding dapat diakses:
<http://lppm.stkippacitan.ac.id>**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Karunia dan Rahmat-Nya sehingga prosiding ini dapat diselesaikan. Prosiding ini merupakan kumpulan makalah yang dipresentasikan pada Seminar Nasional tanggal 14 Oktober 2017, dengan tema “Manifestasi Saintifik untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa pada Era Konseptual”.

Sesuai dengan tema seminar, semua makalah menyajikan berbagai ragam kajian teoritis maupun hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan wawasan, inovasi pengembangan keilmuan, utamanya dalam menyikapi era konseptual yang sedang bergulir.. Makalah yang dimuat dalam prosiding ini telah melalui tahap seleksi, yakni melalui proses review oleh tim yang nama anggotanya tercantum pada halaman awal di prosiding ini.

Pada kesempatan ini panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyelenggaraan seminar ini. Khususnya, kepada seluruh peserta seminar diucapkan terima kasih atas partisipasinya, semoga memberikan kebermanfaatan bagi kita semua.

Pacitan, 14 Oktober 2017

Panitia

KORUPSI DAN KEBANGKRUTAN SEBUAH BANGSA

Dr. Mukodi, M.S.I.
STKIP PGRI Pacitan
e-mail: mukodi@yahoo.com

Abstrak

Korupsi merupakan penyebab utama kebangkrutan suatu bangsa. Ia harus dimusnahkan. Agar bangsa dan negara bisa tetap kokoh berdiri. Artikel ini menemukan bahwa (1) korupsi menjadi musuh bersama agama-agama dunia. Tidak ada satu agama pun yang membenarkan praktik koruptif; (2) dampak nyata korupsi, meliputi terjadinya krisis ekonomi, ketimpangan sosial dan kemiskinan, bobroknya birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi menjadi kacau, tumpulnya penegakan hukum, keroposnya pertahanan dan keamanan, kerusakan lingkungan dan pendidikan; (3) pendidikan anti korupsi dapat dijadikan solusi untuk pencegahan dan penyadaran korupsi.

Keyword: korupsi, kebangkrutan, dan pendidikan anti korupsi

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan kebangsaan terberat saat ini adalah masalah korupsi. Ia seolah hadir dan menyangi disetiap kehidupan. Tak heran, suatu saat koran yang terbit di Hongkong pernah memperolok-olok kita dengan menyatakan, “kalau orang China korupsi di bawah meja, orang India di atas meja, sedangkan orang Indonesia mejanya sekalian dibawa.”ⁱ Candaan ini tentunya tidaklah isapan jempol semata. Sebab, data *Corruption Wacht* menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir ini, tidak ada perbaikan yang signifikan dibidang korupsi di Indonesia. Pada tahun 2016 ini, skor *Corruption Perceptions Index (CPI)* Indonesia sebesar 37 dan menempati urutan 90 dari 176 negara yang diukur. Skor Indonesia naik satu poin, dan turun dua peringkat dari tahun sebelumnya. Akan tetapi skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2016 ini masih berada di bawah Malaysia yang meraih skor 49, Brunei (58), dan Singapura (85).ⁱⁱ

Fenomena tersebut, begitu nyata tatkala publik dipertontonkan para pesakitan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) setiap saat. Hasil OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK pada 2017 kepada sejumlah Kepala Daerah dan pejabat negara menjadi bukti autentiknya. Setidaknya ada 7 Kepala Daerah yang tertangkap tangan. Sebut saja penangkapan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Wali Kota Tegal Siti Masitha, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari, dan Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi.ⁱⁱⁱ

Lebih dari itu, terhitung 2004 hingga Juni 2017, data statistik KPK menyebutkan, telah ada 78 kepala daerah yang terjerat korupsi. Setidaknya, ada 18 orang gubernur dan 60 orang wali kota atau bupati dan wakilnya.^{iv} Ekses ikutannya, para pejabat dilevel di bawahnya seolah mengikuti. Buktinya, tidak sedikit pejabat dilevel Forkompimda yang terjerembab korupsi. Bahkan, aparaturnegara dilevel terendah, yakni kepala desa pun ikut terlibat di dalamnya. Dalam konteks itulah, tulisan ini akan difokuskan pada pemaknaan korupsi dalam perspektif agama dan ekses ikutannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Korupsi Menurut Perspektif Agama

Agama Islam

Korupsi sering dalam perspektif agama Islam seringkali dikaitkan dengan kata *ghulûl*. *Ghulûl* secara leksikal dimaknai *akhdh al-shay' wadassuhû fi matâ'ihî*, yang

artinya mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Secara terminologi, *ghulûl* muncul karena ada penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Selain konsep *ghulûl*, ada istilah *rishwah* yang bermakna komisi, hadiah, upah, dan pemberian, yang dapat pula diberikan arti sebagai uang sogok, sementara dalam QS. al-Mâi'dah [5]: 38, menyinggung masalah *ghasab* dan *saraqah*.^v

Sebagai kejahatan modern, dampak negatif yang ditimbulkannya tidak hanya mengancam keseimbangan negara, namun juga menodai prinsip keadilan, kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, bahkan misi agama. Ketika agama datang mendeklarasikan prinsip keadilan, kejujuran dan penggunaan kewenangan sesuai fungsinya, tindakan korupsi justru melawan semua itu. Ketika Allah SWT mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi (Al-Baqarah [2]: 30), sikap amanah adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa ditawar. Korupsi terjadi karena pelakunya mengalami sesat pikir atas prinsip kejujuran dan amanah.^{vi}

Agama Kristen

Korupsi dalam agama Kristen juga dilarang dan tidak dibenarkan. Dalam pandangan kaum Kristiani, korupsi identik dengan perbuatan mencuri seperti disebutkan dalam larangan kedelapan 10 Perintah Tuhan. Selain itu, korupsi dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum' (Roma 13:3).^{vii}

Lebih dari itu, korupsi dipandang sebagai bentuk pengingkaran kepada Tuhan yang Maha Memelihara Umatnya, disebutkan dalam Timotius 6: 6: "adalah benar bahwa melayani Allah membuat orang menjadi sangat kaya jika mereka telah merasa puas dengan yang dimilikinya", serta Matius 6: 25-26 "Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Korupsi juga dimaknai sebagai tanda ketamakan manusia.^{viii}

Agama Hindu

Korupsi menurut Agama Hindu dilarang keras. Nilai pendidikan yang paling mencerminkan konsep pendidikan anti korupsi dalam ajaran Hindu adalah Asteya (yakni larangan mencuri) seperti yang disebutkan dalam Sloka 149 Kitab Sarasamuscaya sebagai berikut:

Yapwan mangke kraman ikang wwang, angalap maasning mamaas, makapanghada kasaktinya, kwehning hambanya, tatan mas nika juga inalap nika, apa pwa dharma, artha, kama nika milu kaalap denika.

Artinya: Jika ada orang yang merampas kekayaan orang lain dengan berpegang pada kekuatannya dan banyak pengikutnya, malahan bukan harga kekayaan hasil curiannya saja yang terampas darinya, tetapi juga dharma, artha, dan kamanya itu turut oleh karena perbuatannya.^{ix}

Dengan demikian, dalam Veda pun sebenarnya banyak nilai yang dapat diinterpretasikan sebagai pendidikan antikorupsi, seperti; Sloka dalam kitab Menawa Dharmasastra (VIII,14—15); (Atharva Veda III.24.5); Sloka 149 Kitab Sarasamuscaya, dan banyak lagi sloka-sloka lainnya yang dapat diinterpretasikan sebagai pendidikan anti korupsi.^x

Agama Budha

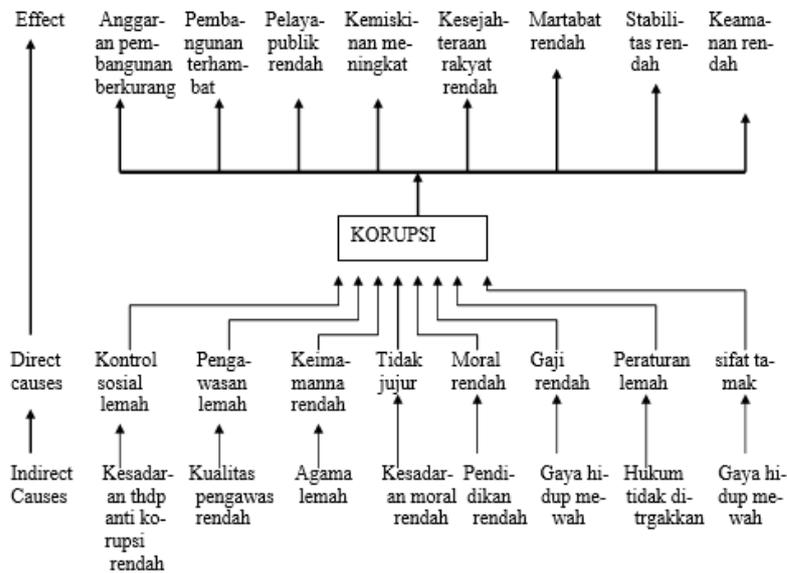
Larangan korupsi juga ditemukan dalam agama Buddha yang mengatakan: "tujuan hidup yaitu nirwana (puncak), manusia korup akan tak bahagia", kemudian agama Hindu yang menyebutkan: "pemimpin korup tak akan hidup kembali, suap sebagai pintu masuk dosa, pendosa tak diakui oleh Tuhan dan kena karma", serta Konfusianis yang menyatakan, "pendidikan beretika, pengendalian diri, pemerintahan akan hancur bila rakyat sudah tak menaruh kepercayaan terhadapnya."^{xi}

Dampak Korupsi Bagi Bangsa dan Bernegara

Praktik-praktik korupsi di suatu negara akan berdampak pada buruknya kondisi suatu bangsa. Hal ini memicu terhadap kondisi melemahnya perekonomian, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk. Akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit dan terbatas. Keamanan suatu negara terancam dan melemah. Kerusakan lingkungan hidup diberbagai bidang tidak terelakkan. Citra pemerintahan menjadi buruk di mata dunia internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing. Akibatnya, krisis ekonomi berkepanjangan, dan negara pun semakin terperosok dalam ketidakberdayaan.^{xii}

Penyebaran korupsi diberbagai elemen masyarakat dikarenakan banyak faktor, diantaranya: rendahnya pengetahuan agama, ketamakan seseorang, rendahnya pengawasan, rendahnya penegakan hukum, rendahnya kontrol sosial, gaya hidup mewah, dan lain sepadannya.

Sementara itu, menurut Bahrin praktik korupsi terjadi dikarenakan efek dari *indirect causes* dan *direct causes*. *Indirect causes* meliputi: kesadaran terhadap korupsi rendah, kualitas pengawas rendah, agama lemah, kesadaran moral rendah, pendidikan rendah, gaya hidup mewah, dan hukum tidak ditegakkan. Sementara *direct causes*, lebih disebabkan diantaranya, kontrol sosial lemah, pengawasan lemah, keimanan rendah, tidak jujur, moral rendah, gaji rendah, peraturan lemah, dan sifat tamak.^{xiii} Lihat lebih lanjut pada pohan masalah korupsi berikut ini:



Gambar 1. Pohon Masalah Korupsi.^{xiv}

Lebi dari itu, dampak korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara begitu nyata. Korupsi akan berdampak terhadap: (1) ekonomi; (2) sosial dan kemiskinan masyarakat; (3) birokrasi pemerintahan; (4) politik dan demokrasi; (5) penegakan hukum; (6) pertahanan dan keamanan; (7) kerusakan lingkungan; (8) dan pendidikan. Lihat gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Dampak Korupsi dalam Pelbagai Sektor

Dampak korupsi terhadap *ekonomi* sangat nyata. Menurut David Peck, korupsi akan menimbulkan berbagai macam permasalahan ekonomi secara alamiah, diantaranya: (a) pertumbuhan ekonomi dan investasi akan melambat; (b) penurunan produktifitas; (c) kualitas barang dan jasa tidak standar; (d) menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak; (e) meningkatnya hutang negara.^{xv}

Dampak korupsi terhadap *sosial dan kemiskinan masyarakat*. Bagi kaum papa (miskin) korupsi berdampak sangat signifikan. Baik secara langsung, maupun tak langsung. Mahalnya jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya mutu dan kualitas pelayanan, dan pembatasan akses pokok--sebut saja terhadap penggunaan air, pendidikan dan kesehatan--merupakan efek secara langsung yang memapar masyarakat miskin. Selain itu, dampak tidak langsung terhadap mereka, diantaranya pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan perseorangan dan golongan, yang seharusnya diperuntukkan untuk kemajuan di sektor sosial dan kaum miskin, melalui pembatasan pembangunan.^{xvi}

Dampak korupsi terhadap *birokrasi pemerintahan*. Dampak korupsi disektor birokrasi pemerintahan, diantaranya: (1) matinya etika sosial politik; (2) tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan; (3) dan birokrasi menjadi tidak efisien.^{xvii} Sementara itu, dampak korupsi terhadap *politik dan demokrasi*, diantaranya: (1) penurunan etika sosial dan politik; (2) tidak efektifnya peraturan perundang-undangan; (3) penurunan efisiensi dan efektifitas birokrasi pelayan masyarakat; (4) meningkatnya angka golput dalam pemilihan umum; (5) penurunan kepercayaan masyarakat kepada sistem demokrasi; (6) menguatnya campur tangan pemilik modal dalam sistem politik; (7) menurunnya kedaulatan rakyat; (8) munculnya 'raja' kecil di daerah.^{xviii}

Di sisi lainnya, dampak korupsi terhadap *penegakan hukum* terlihat pada hilangnya ketegasan dibidang hukum, dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Sementara itu, dampak yang terjadi dibidang *pertahanan dan keamanan* tercermin dari (1) kerawanan hankamnas karena lemahnya alusista dan sumber daya manusai; (2) lemahnya garis batas negara; (3) menguatnya kekerasan dalam bidang masyarakat.

Lebih dari itu, dampak korupsi terhadap *kerusakan lingkungan* berakibat pada menurunnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup, meningkatnya kerusakan lingkungan, menurunnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup, kerusakan hutan dan konservasi. Parahnya lagi, dampak korupsi terhadap pendidikan berakibat pada rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses pendidikan, rendahkan indek

pembangunan manusia (IPM), rendahnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM).

Pendidikan Anti Korupsi

Korupsi dan segala eksekusinya harus segera diatasi dengan cepat. Sebab, momentum untuk menjadi bangsa besar sudah terbuka lebar. Bonus demografi sudah dan sedang terjadi. Agar tindakan koruptif tidak lagi mendera dalam kehidupan manusia diperlukan pendidikan anti korupsi. Pendidikan korupsi tersebut dapat bergerak dalam tiga ranah. Yakni, diranah keluarga (pendidikan informal), diranah lingkungan masyarakat (pendidikan non formal), dan diranah sekolah (pendidikan formal).

Namun demikian, pendidikan anti korupsi harus diimbangi dengan penegakan hukum yang berkeadilan, pemerataan kesejahteraan rakyat, stabilitas keamanan dan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, kebangkrutan sebagai suatu bangsa tidak akan terjadi.

Kesimpulan

Semua ajaran agama di dunia menentang keras praktik koruptif. Semua teks-teks agama mengutuk pelakunya dan mengategorikan sebagai tindakan keji. Korupsi akan berdampak terhadap kehidupan manusia. Dengan demikian, korupsi harus dihentikan. Pendidikan anti korupsi dapat dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan peyadaran.

REFERENSI

- Azumardi Azra, "Agama dan Pemberantasan Korupsi", dalam Harmanto, "Pendidikan Antikorupsi Melalui Budaya Sekolah Berbasis Nilai-Nilai Keislaman," Jurnal *Islamica*, Vol. 7, No. 1, 2012.
- Anonim, "7 Kepala Daerah Dijerat KPK Selama 2017, Teranyar Bupati Cantik yang Gemar Undang Musik Cadas," <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/26/7-kepala-daerah-dijerat-kpk-selama-2017-teranyar-bupati-cantik-yang-gemar-undang-musik-cadas>.
- Arfan Faiz Muhlizi, "Membangkitkan Budaya Nusantara yang Anti Korupsi" dalam Jurnal *RechtsVinding Online: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 1, 2014.
- Bahrin, "Dampak Korupsi Terhadap Kehancuran Negara dan Upaya Penanggulangannya," makalah dipresentasikan dalam Mata Kuliah *Pengantar ke Falsafah Sains* (PPS702) pada Sekolah Pasca Sarjana S3 Institut Pertanian Bogor, Mei 2004.
- David Peck, "Dampak Masif Korupsi," dalam Nanang T. dkk., (ed.) *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011.
- Fana Suparman, "Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2016 Turun," <http://www.beritasatu.com/hukum/411045-peringkat-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2016-turun.html>.
- [Http://nasional.kompas.com/read/2017/09/19/07000031/hingga-september-2017-5-kepala-daerah-terjaring-ott-kpk-siapa-saja-mereka?page=all](http://nasional.kompas.com/read/2017/09/19/07000031/hingga-september-2017-5-kepala-daerah-terjaring-ott-kpk-siapa-saja-mereka?page=all).
- Haidar Bagir, "Korupsi Dari Perspektif Filsafat Dan Etika Islam," dalam Nina Mariani Noor (ed.), *Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi dari Konsep ke Praktek di Indonesia*, (Yogyakarta: Globethics.net, 2015), h. 22.
- I Ketut Suda, "Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Hindu," www.unhi.ac.id/wp.../Makalah-Seminar-STAH-MATARAM., diakses pada tanggal 11 Oktober 2017.
- Mukodi dan Afid Burhanuddin, *Pendidikan Anti korupsi: Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif Di Sekolah*, Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014.
- Purbayu Budi Santosa, "Korupsi Bangkrutkan Nasionalisme," Jurnal *Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, 2011.